

# renja

RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

KABUPATEN SOLOK SELATAN

TAHUN 2022



**TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.

Rencana Kerja merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 dan hasil evaluasi program kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak dijumpai kekurangan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Kominfo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Padang Aro,        Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**Drs. SYAMSURIZAL, MM**

NIP. 196207101987031009

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2022, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, Provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Kabupaten.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144);
  15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor.... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam rangka perwujudan

kepemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022).

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah sebagai berikut :

- **BAB I Pendahuluan** : Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;
- **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu** : Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- **BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah** : Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan;
- **BAB IV Rencana Kerjadan Pendanaan Perangkat Daerah**
- **BAB V Penutup.**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dari output dan pengukuran kinerja program dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2022.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan 2016-2021 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan 2021 dan realisasi APBD untuk Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2021.

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah mencapai nilai rata-rata capaian kinerja output sebesar 41,63%. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 2.939.969.232,-. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

Renja dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Persentase
1	1. Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	1 Jumlah Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi yang Terdata dan Memenuhi Syarat dan Ketentuan	10 Jasa Pos dan Titipan	7 Usaha	70%
		2 Jumlah Menara Telekomunikasi yang Tedata dan Memenuhi Syarat dan Ketentuan	57 BTS	57 Menara	100%
	2. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK pelayanan publik.	3 Jumlah OPD yang Terhubung dengan Internet dan LAN (Local Area Network).	33 OPD	33 OPD	100%
		4 Terlaksanakannya Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan	33 OPD	20 OPD	66,67%
2	1. Meningkatnya Diseminasi Informasi dan keterbukaan informasi publik.	1 Jumlah Website OPD yang Telah Dilakukan Updating Secara Berkala	28 OPD	8 OPD	28,58%
		2 Jumlah Layanan Data Pembangunan Kabupaten Solok Selatan	32 OPD	32 OPD	100%
		3 Tersedianya Layanan Akses Informasi Interaktif Masyarakat dan Penambahan Penguatan Radio 1 Tower dan 2 perangkat	12 Bulan	7 Bulan	58,33%
	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
	2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	1 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang Dikembangkan, Dibina dan Diberdayakan	7 Kelompok	7 Kelompok	100%
		2 Jumlah Partisipasi dalam Pameran/Expo untuk Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi	1 laporan	0	0%
3	1. Mewujudkan Pelayanan dan Pengamanan Informasi Yang Handal.	1 Jumlah dokumen statistik dan PDRB yang tersusun	1 Dokumen	0	0%
		2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	7 OPD	0	0%

Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja output tahun 2021 sampai bulan Juli adalah sebagai berikut:



- a. Program informasi dan komunikasi publik terdiri dari satu kegiatan yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dan beberapa sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik dengan anggaran Rp366.472.000,- sudah terealisasi sebesar Rp2.300.900,- atau sebesar 0,63%.
  2. Pengelolaan media komunikasi publik dengan anggaran Rp523.812.500,- sudah terealisasi sebesar Rp186.556.400,- atau sebesar 35,62%.
  3. Pelayanan informasi publik dengan anggaran Rp135.000.000,- sudah terealisasi sebesar Rp45.236.986,- atau sebesar 33,51%.
  4. Kemitraan dengan pemangku kepentingan dengan anggaran Rp56.230.000,- sudah terealisasi sebesar Rp30.645.000,- atau sebesar 54,50%.
  5. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dengan anggaran Rp28.220.000,- sudah terealisasi sebesar Rp5.932.800,- atau sebesar 21,02%.
  6. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas dengan anggaran Rp603.000,- sudah terealisasi sebesar Rp603.000,- atau 100%.
  7. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi public pemerintah daerah kab/kota dengan anggaran Rp345.430.000,- sudah terealisasi sebesar Rp161.790.000,- atau sebesar 46,84%.
- b. Program aplikasi informatika terdiri dari satu kegiatan yaitu pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota dan satu sub kegiatan yaitu penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah. Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp1.964.390.400,- sudah terealisasi sebesar Rp640.015.956,- atau sebesar 32,58%.
- c. Program penyelenggaraan statistik sektoral terdiri dari satu kegiatan yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah kab/kota dan satu sub kegiatan yaitu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral. Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp145.828.000,- sudah terealisasi sebesar Rp29.581.900,- atau sebesar 20,29%.

- d. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terdiri dari satu kegiatan yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota dan satu sub kegiatan yaitu penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kab/kota. Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp50.000.000,- sudah terealisasi sebesar Rp6.910.900,- atau sebesar 13,82%.

Berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 sampai Bulan Juli.

Tabel 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Kabupaten Solok Selatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006	Program/ Kegiatan Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-13		(14) = 7 + 13		(15) = 14/6 x 100%		-16				
1	Tersedianya kegiatan pendukung dinas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		1,622,071,931	-	820,310,772	-	992,544,372	-	390,456,319	-	1,210,767,091	-	75%					
		Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan materai	5	Tahun	3,356,621	4	Tahun	2,563,000	175	Lembar	3,800,000	175	Lembar	1,750,000	4,5	Tahun	4,313,000	128%	Kominfo
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	5	Tahun	18,833,662	4	Tahun	28,518,482	12	Bulan	37,100,000	7	Bulan	16,312,648	4,5	Tahun	44,831,130	238%	Kominfo
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas /operasional	5	Tahun	11,182,658	4	Tahun	1,869,350						4	Tahun	1,869,350	17%	Kominfo	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tenaga pendukung administrasi kantor	5	Tahun	175,689,273	4	Tahun	77,720,000	0	0	0	0	0	4	Tahun	77,720,000	44%	Kominfo	
				Tersedianya tenaga pengelola keuangan			-			9	Orang	200,280,000	9	Orang	105,000,000	9	Orang	105,000,000			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	3	Orang	37,800,000	3	Orang	37,800,000	2	Orang	37,800,000	2	Orang	22,050,000	5	Orang	59,850,000	158%	Kominfo

	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	5	Tahun	4,114,489	4	Tahun	2,277,000	3	Jenis	5,390,000	3	Jenis	4,375,300	4,5	Tahun	6,652,300	162 %	Kominfo
	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5	Tahun	63,814,078	4	Tahun	19,385,764	3	Jenis	50,529,000	3	Jenis	9,726,000	4,5	Tahun	29,111,764	46%	Kominfo
			Tersedianya alat tulis kantor							35	Jenis		35	Jenis		35	Jenis	-		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5	Tahun	29,992,617	4	Tahun	18,174,300	1	tahun	17,340,000	7	Bulan	7,345,250	4,5	Tahun	25,519,550	85%	Kominfo
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	5	Tahun	3,506,736	4	Tahun	1,500,000	3	Jenis	2,490,018	3	Jenis	1,085,000	4,5	Tahun	2,585,000	74%	Kominfo
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5	Tahun	38,288,447	4	Tahun	92,465,000	5	Jenis	33,575,000	1	Jenis	9,726,000	4,5	Tahun	102,191,000	267 %	Kominfo
			Tersedianya alat tulis kantor	0	0	0	0	0	0	35	Jenis	-	35	Jenis		35	Jenis	-		
	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu kantor untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran	5	Tahun	25,525,631	4	Tahun	3,869,800	0	0	0	0	0	0	4	Tahun	3,869,800	15%	Kominfo
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	5	Tahun	601,675,594	4	Tahun	217,800,712	1	tahun	179,006,000	7	Bulan	139,121,425	4,5	Tahun	356,922,137	59%	Kominfo
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor		Meningkatnya kinerja pendukung administrasi perkantoran	5	Tahun	268,019,128	4	Tahun	96,000,000							4	Tahun	96,000,000	36%	Kominfo
	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	5	Tahun	2,272,997	4	Tahun	1,475,000	11	Jenis	5,000,000	11	Jenis	1,193,000	4,5	Tahun	2,668,000	117 %	Kominfo
																		-		

	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>			<b>169,000,000</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>109,446,182</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>210,117,177</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>36,385,848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145,832,030</b>	<b>86%</b>	<b>Kominfo</b>
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2	Unit	100,000,000	2	Unit	0						0	Unit	-	0%	Kominfo	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	5	Tahun	19,000,000	4	Tahun	20000000	2	Unit	79,974,177	2	Unit	4,5	Tahun	20,000,000	105%	Kominfo	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas /operasional	5	Tahun	50,000,000	4	Tahun	89,446,182	9	Unit	130,143,000	9	Unit	36,385,848	4,5	Tahun	125,832,030	252%	Kominfo
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Tersedianya SDM pada Dinas komunikasi dan Informatika yang profesional dalam menuju pengelolaan pemerintahan berbasis e-Government</b>			<b>75,000,000</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>Kominfo</b>
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Dinas komunikasi dan Informatika		Jumlah SDM di bidang komunikasi dan Informatika yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam menuju pengelolaan pemerintahan berbasis e-Government	20	Orang	75,000,000	20	Orang	-	0	0	0	0	0	-		-	0	0%	Kominfo
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentasi pelayanan publik yang bisa diakses oleh masyarakat</b>			<b>3,265,000,000</b>		<b>-</b>	<b>1,875,585,146</b>		<b>-</b>	<b>2,322,722,085</b>		<b>-</b>	<b>832,450,956</b>	<b>175</b>	<b>-</b>	<b>2,708,036,102</b>	<b>83%</b>	<b>Kominfo</b>

	Pembinaan dan Pengawasan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi yang Terdata dan Memenuhi Syarat dan Ketentuan	17	Jasa pos titipan	75,000,000	17	Jasa pos titipan	102,940,000	17	Jasa Pos dan Titipan	56,646,150	17	Jasa Pos dan Titipan	30,645,000	17	Jasa Pos dan Titipan	133,585,000	178 %	Kominfo	
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		Jumlah Menara Telekomunikasi yang Terdata dan Memenuhi Syarat dan Ketentuan	80	BTS	100,000,000	80	BTS	43,401,000	57	BTS		57	BTS	57	BTS	43,401,000	43%	Kominfo		
	Pembangunan Jaringan Lokal Area Network (LAN) antar SKPD	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah OPD yang Terhubung dengan Internet dan LAN (Local Area Network)	28	SKPD	3,000,000,000	28	SKPD	1,701,514,146	33	OPD	1,977,292,085	33	OPD	640,015,956	33	OPD	2,341,530,102	78%	Kominfo	
	Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan		Terlaksanakannya Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan	28	SKPD	90,000,000	28	SKPD	27,730,000						28		27,730,000	31%	Kominfo		
	Pengembangan jaringan di Sekretariat Daerah		Terhubungnya jaringan internet di bagian-bagian pd Setda	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	Kominfo	
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Publikasi Informasi Pembangunan Daerah							20	Media Publikasi	345,430,000	20	Media Publikasi	161,790,000	20	Media Publikasi	161,790,000		Kominfo	
			Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah							20	Media Publikasi		20	Media Publikasi		20	Media Publikasi	-		Kominfo	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DENGAN MEDIAMASA</b>		<b>Terwujudnya Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik</b>			<b>100,000,000</b>		<b>-</b>	<b>36,700,001</b>		<b>-</b>	<b>28,823,000</b>		<b>-</b>	<b>6,535,800</b>		<b>-</b>	<b>43,235,801</b>	<b>-</b>	<b>43%</b>	Kominfo
	Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Expo	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Partisipasi dalam Pameran/Expo untuk Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi	4	Kali	50,000,000	4	Kali	10,200,001	1	Kali	603,000	0	Kali	603,000	0	Kali	10,803,001	22%	Kominfo	

	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang Dikembangkan, Dibina dan Diberdayakan	7	KIM	50,000,000	7	KIM	26,500,000	7	Kelompok	28,220,000	7	Kelompok	5,932,800	7	Kelompok	32,432,800	65%	Kominfo
				2	Media Lokal		2	Media Lokal										-		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KWALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentasi pelayanan publik yang bisa diakses oleh masyarakat</b>			<b>750,000,000</b>		<b>-</b>	<b>270,165,940</b>		<b>-</b>	<b>630,812,500</b>		<b>-</b>	<b>231,793,386</b>		<b>-</b>	<b>501,959,326</b>	<b>67%</b>	Kominfo
	Peningkatan dan Pengembangan Website Kab. Solok Selatan	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Jorong atau Nagari yang Terhubung secara TI dengan Pusat Pemerintahan	28	SKPD	100,000,000	28	SKPD	67,675,000	1	Lokasi	114,800,000	1	Lokasi	45,236,986	1	Lokasi	112,911,986	113%	Kominfo
			Jumlah Layanan Data Pembangunan Kabupaten Solok Selatan	0	0	0	0	0	0	32	OPD		32	OPD		32	OPD	-		Kominfo
			Jumlah Website OPD yang Telah Dilakukan Updating Secara Berkala	0	0	0	0	0	0	28	OPD		28	OPD		28	OPD	-		Kominfo
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Peserta Bako Humas	32	SKPD	150,000,000	32	SKPD	47,773,250	20	Orang	516,012,500		Orang	186,556,400		Orang	234,329,650	156%	Kominfo
			Jumlah Publikasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	20	Media Publikasi		20	Media Publikasi		20	Media Publikasi	-		Kominfo
			Tersedianya Layanan Akses Informasi Interaktif Masyarakat dan Penambahan Penguatan Radio 1 Tower dan 2 perangkat	0	0	0	0	0	0	12	Bulan		7	Bulan		7	Bulan	-		Kominfo
	Pengoperasian Studio Radio Pemerintah Daerah		Jumlah Layanan akses informasi interaktif masyarakat secara berkala dan Penambahan Penguatan radio 1 tower dan 2	5	Tahun	150,000,000	4	Tahun	128,845,014	0	0	0	0	0	0	0	0	128,845,014	86%	Kominfo

			perangkat																			
	Kampung Digital		Jumlah Jorong (SRG dan Wono Rejo) atau nagari yang terhubung secara TI dengan pusat pemerintahan	2	Nagari	350,000,000	2	Nagari	25,872,676	0	0	0	0	0	0	0	0	25,872,676	7%	Kominfo		
	<b>PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											<b>318,214,000</b>			<b>2,300,900</b>			<b>2,300,900</b>				Kominfo
	Penyusunan Cetak Biru (blue Print) Pembangunan TI Kabupaten Solok Selatan	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya Master Plant SPBE	0	0	0	0	0	0	1	Dokumen	318,214,000	0	Dokumen	2,300,900	0	Dokumen	2,300,900			Kominfo	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI / STATISTIK DAERAH</b>	<b>PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>Penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai publik</b>			<b>160,000,000</b>			<b>128,550,000</b>			<b>158,395,000</b>			<b>29,581,900</b>			<b>158,131,900</b>	<b>99%</b>	Kominfo		
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Tersedianya Buku Solok Selatan	2	Dokumen	80,000,000	2	Dokumen	42,573,500	7	Dokumen	158,395,000	0	Dokumen	29,581,900	2	Dokumen	72,155,400	90%	Kominfo		
Tersedianya Dokumen Kecamatan Dalam Angka Solok Selatan										1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen	-		Kominfo		
Tersedianya Dokumen PDRB Solok Selatan										1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen	-		Kominfo		
	Penyusunan Dan pengumpulan data PDRB		Tersedianya Buku PDRB Solok Selatan	1	Dokumen	80,000,000	1	Dokumen	42,997,500	0	0	0	0	0	-	0	0	42,997,500	0	54%	Kominfo	
	Kerjasama penyusunan Dokumen Statistik sektoral		Tersusunnya data statistik sektoral	0	0	-	0	0	<b>42,979,000</b>	0	0	0	0	0	-	0	0	42,979,000	0		Kominfo	



	Program Pengelolaan Persandian Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terjaganya keamanan seluruh Aset Informasi Daerah			230,000,000			29,818,100			33,351,000	-	6,910,900	-	36,729,000		16%	Kominfo		
	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan persandian daerah	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi			120,000,000			29,818,100	7	OPD	33,351,000	0	OPD	6,910,900	0	OPD	36,729,000	31%	Kominfo	
	Fasilitasi karya bakti sekolah tinggi sandi negara ke situs PDR1		Jumlah fasilitasi karya bakti sekolah tinggi sandi negara ke situs PDR1	1	Kali	110,000,000	1	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0%	Kominfo

## 2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Kominfo

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 sampai bulan Juli, ada beberapa item yang dijadikan indikator capaian kinerja yaitu :

1. Pembangunan Jaringan Lokal Area Network (LAN) antar SKPD

Pembangunan Jaringan Lokal Area Network (LAN) antar SKPD dengan hasil sebanyak 33 terhubung dalam jaringan internet dan LAN yang merupakan salah satu tahap pembangunan dan pengembangan e-Government di Kabupaten Solok Selatan.

2. Website Pemerintah Daerah

Website sebagai sarana sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Di Kabupaten Solok Selatan website pemda sudah dibawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.

3. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi

Indikator pencapaian dari kegiatan Pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi diantaranya berupa adanya pengawasan dan pengurangan titik blank spot di beberapa daerah di Kabupaten Solok Selatan.

4. Fasilitas Kampung Digital

Indikator pencapaian dari kegiatan Fasilitas Kampung Digital diantaranya berupa tersedianya akses internet dan Wifi pada kawasan pariwisata di beberapa daerah di Kabupaten Solok Selatan.

Setelah terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan, maka perlu ditetapkan indikator dan tolak ukur untuk tercapainya nya target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan yang mengacu kepada tugas pokok antara lain ;

1. Melakukan kegiatan pengembangan e-Government

2. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Informasi dan layanan komunikasi

3. Penyusunan bahan-bahan data persandian dan statistik daerah

4. Pemberitaan sebagai publikasi dan sosialisasi informasi dan desentralisasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Adapun yang menjadi indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan yang sesuai dengan tugas pokok tersebut diatas adalah :

1. Memfasilitasi ketersediaan jaringan komunikasi dan mengatasi beberapa titik blank spot di beberapa daerah.
2. Menyediakan aplikasi sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan portal layanan masyarakat mudah diakses.
3. Penyebarluasan informasi melalui operasional studio radio,
4. Memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif melalui pengelolaan dan pengembangan website dan pengelolaan PPID.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi dan informasi melalui diseminasi Informasi dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
6. Serta menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data statistik dan melaksanakan kegiatan persandian dan pengamanan informasi.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan mendukung seluruh fasilitas antara lain :

- a. Penyediaan, pengelolaan sistem Informasi melalui media baru dalam bentuk domain situs web pemerintah Kabupaten Solok Selatan maupun sub domain yang dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kecamatan dan nagari. Hal ini merupakan salah satu program dalam melaksanakan pengembangan e-Government dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta ikut berpartisipasi didalam pembangunan dengan menggunakan media internet.
- b. Layanan maintenance, penyediaan jaringan komputer dan Internet. Komputer dan jaringan internet adalah produk teknologi yang life design atau life cycle-nya relatif pendek serta rentan gangguan serta kerusakan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pemeliharaan komputer dan pengecekan jaringan secara berkala. Layanan pembuatan jaringan LAN dilakukan untuk memberikan perluasan akses internet bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memerlukannya.
- c. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sampai ke tingkat Kecamatan agar dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- d. Collecting data dan security data agar seluruh informasi yang dibutuhkan baik untuk institusi pemerintah maupun masyarakat dapat terkendali dalam satu sistem data center serta menghasilkan data dan informasi yang uptodate/terkini dan real time.

Dinas Komunikasi dan Informatika meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter dan Kelompok Informasi Masyarakat. Kemudian dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyajikan informasi tersebut dalam bentuk website atau portal.

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan pada pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 (berjalan) dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT di pemerintah daerah di berbagai wilayah maka kami menghadapi beberapa permasalahan dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya :

1. Pembangunan Teknologi Informasi saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Kurangnya SDM dibidang Teknologi Informasi baik dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika maupun seluruh Dinas Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan.
3. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor dilingkungan pemerintahan, pemerintah dengan *stakeholders* maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal.
4. Pengelolaan Radio masih terbatas baik dari sisi jangkauan siaran maupun kelengkapan sarana dan prasarana.
5. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi tingkat Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Yang menjadi penyebab masalah antara lain:
  - Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi yang berbukitan
  - Terbatasnya kapasitas Bandwith internet dalam mengoptimalkan kebutuhan data internet keseluruhan OPD.
6. Perlunya pelatihan dan peningkatan pengetahuan Teknologi Informasi.

7. Belum maksimalnya operator website setiap OPD dalam membuat dan mempublikasikan berita OPD di website masing-masing OPD.
8. Perlunya memaksimalkan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD

#### **2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

- Adanya penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri No 90 Tahun 2019, sehingga sebagian harus dilakukan penggabungan kegiatan dalam penyesuaiannya.
- Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 belum bisa direview berdasarkan rancangan awal RKPD, disebabkan rancangan awal RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan belum selesai.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Dinas Kominfo. Namun dalam proses ini Dinas Kominfo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo terhadap seluruh perangkat daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok Selatan. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan harus sejalan dengan pencapaian **visi** dan  **misi** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 adalah : **“Meningkatnya Kinerja Layanan Publik yang Berkualitas dan Inovatif”** dengan **“Indeks Pelayanan Publik”** sebagai Indikator Sasaran.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 adalah :

**“Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Akses Telekomunikasi ”** dengan **Indeks SPBE** dan **Persentase jorong yang dilayani akses telekomunikasi** sebagai Indikator Sasaran.

Dari Sasaran Jangka Menengah tersebut dapat dijelaskan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan telah sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke 3 yaitu **“Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani “**

### 3.2. Program dan kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sejalan dengan Visi Kabupaten Solok Selatan tahun 2021–2026 yaitu **“MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN MAJU DAN SEJAHTERA “**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 merencanakan empat program prioritas selain program administrasi rutin lainnya, program tersebut meliputi:

#### 1. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja yaitu Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Program ini mempunyai target pendanaan yaitu sebesar Rp. 1.010.000.000,- untuk tahun 2022.

Sub kegiatan pada program ini adalah:

- a. Pengelolaan media komunikasi publik Rp. 75.000.000,-
- b. Pelayanan informasi publik Rp. 95.000.000,-
- c. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik Rp. 100.000.000,-
- d. Penyelegaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas Rp. 540.000.000,-
- e. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota Rp. 200.000.000,-

#### 2. Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika mempunyai beberapa indikator kinerja yaitu:

- Persentase jorong yang dilayani akses telekomunikasi;
- Nilai Indeks SPBE;
- Persentase penanganan terhadap gangguan cyber;

Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu

1. Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja adalah
  - Persentase jorong yang dilayani akses telekomunikasi, Nilai Indeks SPBE dan persentase penanganan terhadap gangguan cybersub kegiatan yaitu :

- 1.1. Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan nilai sebesar : Rp. 30.000.000,- untuk indicator nya adalah Jumlah Sub Domain pemerintah daerah yang ditata dan diawasi
- 1.2. Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah dengan indikator kinerja yaitu Jumlah OPD yang terhubung dengan internet. Sub kegiatan ini mempunyai target pendanaan yaitu sebesar Rp. 1.820.000.000,- untuk tahun 2022.
2. Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja yaitu
  - Persentase Aplikasi SPBE yang dikelola
  - Persentase penurunan jumlah blankspot

Sub Kegiatan yaitu :

- 2.1. Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi pagu indikatif sebesar Rp.100.000.000,- dengan indicator kinerja yaitu Jumlah tenaga pengamanan Sistem server dan Aplikasi;
  - 2.2. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik Pagu Indikatif sebesar Rp. 200.000.000,- dengan indicator kinerja yaitu Jumlah Tenaga Programmer yang dibayarkan;
  - 2.3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas dengan Pagu Indikatif Rp.30.000.000,- dengan indicator kinerja yaitu Jumlah lokasi percontohan berbasis IT (kampung Digital);
  - 2.4. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 65.000.000,- dengan indicator kinerja Jumlah Internet Satelit (Vsat) yang terdata dan Jumlah Menara Telekomunikasi yang terdata.
3. Program penyelenggaraan statistik sektoral  
Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota dan satu sub kegiatan yaitu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,- indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan



daerah dan persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

4. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan satu sub kegiatan yaitu penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kegiatan strategis yang diamankan. Program ini mempunyai target pendanaan yaitu sebesar Rp. 37.500.000,- untuk tahun 2022.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Prioritas							
					Nasional	Daerah						
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			6,362,010,143		7,479,841,023					
2	16	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	100%	3,153,010,143		3,961,841,023			
2	16	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2,613,710,143		3,370,591,023			
2	16	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN	28 Orang	2,529,630,143	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3,278,103,023	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan dan Barang	10 Orang	84,080,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	92,488,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100%	303,500,000			331,870,000	
2	16	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	5 Jenis	3,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	3,300,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Pendukung Peralatan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor	5 Jenis 33 Jenis	70,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	77,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	20 Jenis	8,500,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	9,350,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	8 Jenis	22,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	22,220,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Jumlah Perjalanan Dinas Biasa Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota	150 Porsi 45 Porsi 8 Kali 70 Kali	200,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	220,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>85,800,000</b>			<b>94,380,000</b>	
2	16	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Materai	400 Lembar	4,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	4,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Air Per 1 Tahun Jumlah Kebutuhan Listrik Per 1 Tahun	400 Kubik 25000 KWh	38,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	41,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis jasa perbaikan peralatan kerja/Peralatan Kantor	5 Jenis	6,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	6,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Penjaga Kantor	2 Orang 1 Orang	37,800,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	41,580,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana prasarana perkantoran yang terpeliharaan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>150,000,000</b>			<b>165,000,000</b>	
2	16	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional, jasa perizinan kendaraan dinas / Operasional	11 Unit	150,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	165,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>60 (Indeks)</b>	<b>1,010,000,000</b>			<b>1,111,000,000</b>	

2	16	002	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pernetase informasi dan komunikasi publik yang dikelola</b>	<b>100%</b>	<b>1,010,000,000</b>			<b>1,111,000,000</b>	
2	16	002	2.01	005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Layanan Akses Informasi Interaktif Masyarakat dan Penambahan Penguatan Radio	1 Media Informasi	75,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	82,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Solok Selatan Jumlah Website OPD yang telah dilakukan Updating secara berkala	33 OPD 33 OPD	95,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	104,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek	35 Orang	100,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dikembangkan, dibina dan diberdayakan Jumlah Partisipasi dalam Pameran/Expo untuk pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Terjalannya kerjasama dengan media dan kehumasan	10 Kelompok 3 Kali 35 Media	540,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	594,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2.01	013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sarana Pendukung Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Jumlah Media Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6 Jenis 20 Media Publikasi 20 Publikasi Informasi	200,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	220,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase penurunan jumlah bankspot Nilai Indeks SPBE Persentase penanganan terhadap gangguan Cyber</b>	<b>2,6% 2,14 (Nilai) 100%</b>	<b>2,199,000,000</b>			<b>2,407,000,000</b>	
2	16	003	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah nama domain dan sub domain yang dikelola perangkat daerah</b>	<b>12 Domain/Sub Domain</b>	<b>1,850,000,000</b>			<b>2,035,000,000</b>	
2	16	003	2.01	002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub domain OPD yang Tersedia Jumlah Website OPD yang Tersedia	12 OPD 12 OPD	30,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	33,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	16	003	2.01	003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Terhubung dengan Internet dan LAN Jumlah Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan	34 OPD 34 OPD	1,820,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	2,002,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Aplikasi SPBD yang dikelola</b>	<b>100%</b>	<b>349,000,000</b>			<b>372,000,000</b>	
2	16	003	2.02	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Tenaga Pengamanan Sistem Server dan Aplikasi	1 Orang	54,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	54,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02	007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Tenaga Programmer yang Dibayarkan	4 Orang	200,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	220,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02	009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Lokasi Percontohan berbasis IT (Kampung Digital)	1 Lokasi	30,000,000	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	33,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2.02	010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Internet Satelit (VSAT) yang terdata, memenuhi syarat dan ketentuan secara teknis Jumlah Menara Telekomunikasi yang terdata, memenuhi syarat dan ketentuan secara teknis	25 VSAT 57 BTS	65,000,000	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana	65,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			<b>100,000,000</b>			<b>110,000,000</b>	
2	20	002			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase data sektoral yang dikelola</b>	<b>100%</b>	<b>100,000,000</b>			<b>110,000,000</b>	
2	20	002	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan data statistik sektoral</b>	<b>80%</b>	<b>100,000,000</b>			<b>110,000,000</b>	
2	20	002	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Database Statistik Sektoral OPD yang Valid Jumlah Dokumen Kecamatan Dalam Angka Solok Selatan Jumlah Dokumen PDRB Solok Selatan Jumlah Dokumen Solok Selatan Dalam Angka	1 Dokumen 7 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			<b>37,500,000</b>			<b>37,500,000</b>	

2	21	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian	22%	37,500,000			37,500,000	
2	21	002	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian	7 PD	37,500,000			37,500,000	
2	21	002	2.01	004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Pendukung Guna Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1 Unit 7 OPD	37,500,000	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani	37,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.

Semoga Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2022.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Padang Aro, Agustus 2021

**KEPALA DINAS**

**Drs. SYAMSURIZAL, MM**  
**NIP. 196207101987031009**